

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)  
DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN**

**Gustiranda Pakaya<sup>1</sup>, Lucyane Djaafar<sup>2</sup>, Sukarman Kamuli<sup>3</sup>, Nopiana Mozin<sup>4</sup>**

PPKN FIS Universitas Negeri Gorontalo<sup>1234</sup>

e-mail: [pakayagusti04@gmail.com](mailto:pakayagusti04@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Pentadio Barat Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan yang terlibat dalam penelitian ini meliputi Ketua Koordinator PKH Kabupaten Gorontalo, Kasie Penyelenggara Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, Kepala Desa Pentadio Barat, Pendamping PKH Desa Pentadio Barat, dan Keluaraga Penerima Manfaat PKH Desa Pentadio Barat. Temuan penelitian menunjukkan pelaksanaan PKH pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Di bidang pendidikan, PKH telah berhasil memperluas akses pendidikan dengan dukungan finansial, meningkatkan tingkat kehadiran di sekolah, dan memberikan pengaruh positif terhadap pencapaian akademik anak-anak penerima manfaat. Di sektor kesehatan, PKH memberikan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan berkualitas, memberikan dukungan khusus bagi lansia serta ibu hamil dan anak-anak, serta melibatkan pendamping PKH dalam pemantauan yang efektif. Sementara itu, dalam aspek kesejahteraan sosial, program ini memberikan bantuan finansial secara berkala, pelatihan keterampilan, dan berbagai upaya lainnya untuk membantu keluarga penerima mengatasi hambatan ekonomi. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan PKH, termasuk kendala dalam koordinasi, perencanaan yang belum optimal, dan ketidaksepakatan dalam penyediaan layanan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan serangkaian tindakan untuk meningkatkan efektivitas program ini, seperti memperkuat koordinasi antara berbagai pihak terkait, meningkatkan sosialisasi dengan pendekatan yang lebih inklusif, serta menerapkan pemantauan yang berkelanjutan guna evaluasi dan perbaikan yang berkesinambungan.

**Kata Kunci:** Implementasi PKH, Pemberdayaan, Masyarakat Miskin.

**ABSTRACT**

*This research aims to examine the implementation of the Family Hope Program (PKH) policy in efforts to empower poor communities in Pentadio Barat Village, Gorontalo Regency. This research employs a descriptive qualitative method. Informants involved in this research are the PKH Coordinator of Gorontalo Regency, the Head of Administration of the Social Security Division of the Social Affairs Office of Gorontalo Regency, the Chief of Pentadio Barat Village, the PKH Facilitator for Pentadio Barat Village, and PKH beneficiary families in Pentadio Barat Village. The results indicate that the implementation of PKH covers education, health, and social welfare. In education, PKH has succeeded in expanding access to education through financial support, increasing school attendance rates, and positively influencing the academic achievements of beneficiary children. In the health sector, PKH provides better access to quality healthcare services, offers targeted support for the elderly, pregnant women, and children, and involves PKH facilitators in effective monitoring. Meanwhile, regarding social welfare, the program provides regular financial assistance, skills training, and various initiatives to help beneficiary families overcome economic barriers. However, this research also identifies several inhibiting factors in PKH implementation, including coordination challenges, suboptimal planning, and disagreements in service provision. Therefore, this*



*research recommends a series of measures to enhance the program's effectiveness, such as strengthening stakeholder coordination, improving outreach through more inclusive approaches, and implementing continuous monitoring for ongoing evaluation and improvement.*

**Keywords:** PKH Implementation, Empowerment, Poor Communities.

## PENDAHULUAN

Desa, sebagai unit wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga dengan sistem pemerintahan mandiri, memegang peranan krusial dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui hak asal usul dan hak tradisional desa dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat. Lebih lanjut, Pasal 2 undang-undang tersebut menegaskan bahwa desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa menjadi fondasi penting yang mencerminkan kemampuan kolektif untuk mencapai kemandirian. Pembangunan infrastruktur di tingkat desa diharapkan mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas akses terhadap layanan sosial dan ekonomi yang esensial. Dalam konteks ini, pemerintah desa mengemban tanggung jawab signifikan dalam menjalankan fungsi pemerintahan, memfasilitasi pembangunan, dan menciptakan harmoni sosial melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa dapat dipahami sebagai proses peningkatan kapasitas individu dan kelompok untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang memengaruhi kehidupan mereka (Hossain & Ali, 2018). Proses ini melibatkan penguatan aset sosial, ekonomi, dan politik masyarakat agar mereka mampu mengelola sumber daya dan mengatasi kerentanan (Narayan, 2017).

Observasi awal yang dilakukan di Desa Pentadio Barat menunjukkan dinamika data penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Pada tahun 2023, tercatat 142 penerima PKH, dan angka ini mengalami peningkatan menjadi 158 penerima pada tahun 2024. Informasi dari aparat desa mengungkapkan bahwa kuota penerima PKH tidak ditentukan di tingkat dinas sosial kabupaten, melainkan nama-nama calon penerima diajukan oleh pemerintah desa langsung ke pusat, di mana proses seleksi dilakukan. Lebih lanjut, observasi di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo memberikan gambaran mengenai pola penyaluran PKH di Desa Pentadio Barat, yang mengalami perubahan dari penyaluran setiap tiga bulan pada tahun 2022 menjadi setiap dua bulan pada pertengahan bulan di tahun 2023 dan 2024. Data dari Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo mencatat fluktuasi jumlah penerima PKH di Desa Pentadio Barat pada tahun 2022 (pencairan 1=37, pencairan 2=127, pencairan 3=160, pencairan 4=158), tahun 2023 (pencairan 1=162, pencairan 2=159, pencairan 3=146, pencairan 4=140, pencairan 5=142), dan tahun 2024 (pencairan 1=138, pencairan 2=170, pencairan 3=169).

Evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pentadio Barat mengidentifikasi beberapa permasalahan terkait aspek dan kriteria penerima PKH. Salah satu isu krusial adalah adanya sejumlah masyarakat yang memenuhi kriteria namun belum menerima bantuan PKH akibat keterbatasan kuota yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, terdapat pula kasus masyarakat yang secara kondisi ekonomi layak menerima PKH namun tidak dapat diakomodir karena tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial. Ironisnya, masih ditemukan penerima PKH yang seharusnya sudah tidak



termasuk dalam kategori Keluarga Penerima Manfaat (KPM) namun masih terus menerima bantuan. Fenomena lain yang terungkap dalam pra-survei adalah keberadaan KPM yang kondisi ekonominya telah meningkat signifikan (sejahtera) namun masih menerima program PKH. Proses pengeluaran KPM yang telah sejahtera dari daftar penerima tidaklah sederhana dan memerlukan beberapa tahapan prosedural, salah satunya melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes).

Ketepatan sasaran program bantuan sosial seperti PKH menjadi kunci efektivitas dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan (Amri & Setiawan, 2020). Tantangan dalam implementasi program seringkali muncul terkait dengan akurasi data penerima dan mekanisme penyaluran yang tepat (Jati & Susilawati, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis implementasi program PKH di Desa Pentadio Barat, dengan mempertimbangkan perspektif pemberdayaan masyarakat dan tantangan-tantangan yang muncul dalam proses penyaluran bantuan, termasuk isu ketidaktepatan sasaran dan mekanisme evaluasi penerima manfaat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam fenomena implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pentadio Barat. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengungkap dinamika sosial, kendala, serta strategi pemberdayaan masyarakat dalam konteks pelaksanaan program bantuan sosial berbasis data empiris di lapangan. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, Kepala Desa Pentadio Barat, staf desa, pendamping PKH, serta masyarakat penerima manfaat. Penentuan informan dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan relevansi dan keterlibatan mereka dalam implementasi program PKH. Proses wawancara dilakukan dalam empat tahap, yang berlangsung antara bulan Juli hingga September 2024. Selain wawancara, peneliti juga mengumpulkan data dokumenter dari pemerintah desa dan Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo terkait jumlah penerima, pola penyaluran bantuan, serta prosedur evaluasi penerima PKH dari tahun 2022 hingga 2024. Analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik, yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan waktu, dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber dan dokumen pendukung untuk memastikan konsistensi serta akurasi temuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan data langsung di lapangan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini melibatkan enam narasumber, yang terdiri dari Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Sosial (1 orang), Kepala Desa (1 orang), staf desa (2 orang), Pendamping PKH (2 orang), serta masyarakat (4 orang). Wawancara pertama dilakukan pada hari Selasa, 24 September 2024, diikuti wawancara kedua pada Kamis, 26 September 2024. Wawancara ketiga dilakukan pada Sabtu, 27 Juli 2024, dan wawancara terakhir dengan masyarakat dilaksanakan pada Senin, 30 September 2024.

### Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin di Desa Pentadio Barat. Namun, program ini juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman penerima manfaat mengenai syarat dan kewajiban yang harus

dipenuhi, keterbatasan kapasitas pendamping PKH, serta ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui PKH memerlukan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan komunitas lokal, untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya bersifat sementara tetapi juga mampu memberikan dampak jangka panjang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan keberhasilan dan kendala implementasi PKH, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas program dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pemahaman penerima manfaat terhadap program, kapasitas pendamping, dan dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah maupun komunitas lokal. Selain itu, tantangan seperti kurangnya pemahaman penerima manfaat mengenai kewajiban yang harus dipenuhi serta potensi ketergantungan terhadap bantuan menunjukkan bahwa komunikasi menjadi elemen kunci dalam pelaksanaan program ini. Penyampaian informasi yang efektif, koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan, serta pengelolaan persepsi masyarakat terhadap tujuan jangka panjang program memerlukan perhatian khusus. Dalam konteks ini, teori komunikasi Edward III menjadi relevan sebagai kerangka untuk memahami bagaimana proses komunikasi dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.



**Gambar 1.** Foto Dokumentasi Penelitian Berlangsung

## Pembahasan

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Program Keluarga Harapan (PKH) telah membawa dampak positif bagi keluarga miskin di Desa Pentadio Barat, masih terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan program. Faktor-faktor tersebut meliputi ketidaktepatan seleksi penerima manfaat, kurangnya pemahaman penerima tentang kewajiban program, kapasitas pendamping yang terbatas, serta ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Ayu et al. (2020) yang menyatakan bahwa implementasi PKH di tingkat desa sering menghadapi kendala teknis dan administratif, terutama dalam hal seleksi penerima dan pelaksanaan kewajiban peserta. Untuk itu, guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan PKH, diperlukan perbaikan dalam sistem seleksi penerima manfaat, peningkatan kapasitas pendamping, serta pelatihan keterampilan ekonomi bagi penerima bantuan agar mereka dapat lebih mandiri dan tidak bergantung pada bantuan dalam jangka panjang (Afriansyah et al., 2023; Alhada et al., 2021).

Peneliti akan menjabarkan temuan penelitian ini lebih lanjut sesuai dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III, dengan mengacu pada indikator-indikator implementasi yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, serta



struktur birokrasi dalam upaya mencapai tujuan program. Komunikasi memainkan peran kunci dalam implementasi PKH di Desa Pentadio Barat. Sebagai komunikator, pendamping PKH bertugas menyampaikan informasi tentang kebijakan, tujuan, dan manfaat program kepada masyarakat. Hal ini diperkuat oleh Firmansyah dan Nugroho (2021) yang menyebutkan bahwa komunikasi yang efektif mampu meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap program bantuan sosial.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pendamping PKH yang mampu menyampaikan informasi secara persuasif dan aktif berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program tersebut. Namun, hambatan komunikasi tetap ada, terutama dalam menjangkau masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dengan akses informasi yang terbatas. Salah satu tantangan besar adalah kurangnya media informasi yang memadai. Masyarakat dengan tingkat literasi rendah atau tinggal di lokasi terpencil sering kali tidak mendapatkan informasi yang memadai. Media tradisional seperti pengumuman desa atau pertemuan langsung belum cukup efektif (Putri & Purnaweni, 2022).

Masalah bahasa dan tingkat literasi masyarakat juga menjadi hambatan signifikan. Penggunaan istilah teknis atau jargon yang sulit dipahami membuat banyak warga kesulitan mencerna informasi. Edward III menegaskan bahwa informasi harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Oleh karena itu, pendamping PKH perlu menyesuaikan cara komunikasi mereka dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian Chasanah et al. (2021) menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi yang personal dan penggunaan bahasa lokal secara signifikan meningkatkan efektivitas penyampaian informasi dalam program PKH.

Selain masalah komunikasi, penelitian ini menemukan bahwa sistem seleksi penerima manfaat juga menjadi tantangan besar. Ketidakakuratan data sering kali membuat masyarakat yang layak menerima bantuan tidak terdaftar, sementara yang tidak memenuhi kriteria tetap tercatat sebagai penerima manfaat. Hal ini sejalan dengan temuan Amri dan Setiawan (2020) yang menyatakan bahwa targeting inaccuracy menjadi salah satu isu utama dalam pelaksanaan program PKH. Sistem berbasis data pusat memerlukan pemutakhiran berkala dan verifikasi yang lebih akurat agar program dapat berjalan tepat sasaran. Keterlibatan masyarakat dalam proses verifikasi data juga penting untuk meningkatkan kepercayaan dan transparansi dalam penyaluran bantuan (Jati & Susilawati, 2019).

Keberhasilan PKH di Desa Pentadio Barat sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya manusia, anggaran, dan peralatan teknologi. Pendamping PKH memiliki peran penting dalam memastikan bantuan sosial sampai kepada penerima manfaat. Meskipun pendamping telah menunjukkan kapasitas yang baik, terbatasnya pelatihan teknologi untuk aparat desa menjadi kendala dalam mendukung proses pendataan dan monitoring program. Penelitian oleh Wulandari et al. (2022) juga menggarisbawahi pentingnya dukungan teknologi dan pelatihan untuk meningkatkan akurasi data dan efektivitas program.

Dari sisi anggaran, proses penyaluran melalui rekening bank yang transparan memberikan kepercayaan kepada masyarakat, meskipun ada kebutuhan untuk menyesuaikan jumlah bantuan dengan kondisi keluarga. Sistem berbasis teknologi yang digunakan dalam pendataan dan pencairan bantuan perlu ditingkatkan untuk memastikan akurasi data (Iswardhana & Attamimi, 2023).

Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pendamping PKH, dan aparat desa menjadi kunci keberhasilan implementasi PKH. Pemerintah daerah berperan memberikan dukungan teknis, pelatihan, dan monitoring agar program dapat berjalan dengan baik. Pertemuan rutin untuk membahas perkembangan program menciptakan ruang diskusi bagi semua pihak untuk menyampaikan tantangan dan mencari solusi bersama. Namun, keterbatasan dalam pelatihan teknologi informasi menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pelatihan untuk aparat desa. Dengan peningkatan kapasitas ini, diharapkan proses pendataan dan



Untuk meningkatkan efektivitas implementasi PKH, perlu dilakukan perbaikan strategi komunikasi dan sistem seleksi penerima manfaat. Pendamping PKH perlu mengadopsi pendekatan komunikasi yang lebih inklusif, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan memanfaatkan berbagai saluran informasi, seperti media sosial, radio lokal, dan pengumuman desa. Pemutakhiran data secara berkala dan verifikasi yang lebih akurat juga harus menjadi prioritas, dengan melibatkan masyarakat dalam proses tersebut untuk meningkatkan transparansi. Selain itu, peningkatan pelatihan untuk aparat desa dalam pemanfaatan teknologi informasi sangat diperlukan agar proses pendataan dan monitoring lebih efektif. Dengan langkah-langkah ini, PKH diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan mendukung pemberdayaan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan mereka (Hossain & Ali, 2018; Endah, 2020; Maulana et al., 2022).

## KESIMPULAN

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pentadio Barat memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan dan kesehatan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang syarat program, ketidaktepatan seleksi penerima manfaat, keterbatasan jumlah pendamping, dan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan. Untuk meningkatkan efektivitas PKH, diperlukan perbaikan sistem seleksi, strategi komunikasi yang inklusif, pemutakhiran data berkala, serta pelatihan keterampilan ekonomi dan teknologi bagi penerima manfaat serta aparat desa. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendukung keberhasilan PKH dalam memberdayakan masyarakat menuju kemandirian.

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pentadio Barat menghadapi tantangan utama berupa rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan program, ketidaktepatan sistem seleksi penerima manfaat berbasis data pusat, dan kurangnya koordinasi antarinstansi. Meskipun penyaluran bantuan berjalan lancar, masalah kesadaran masyarakat dan pemutakhiran data menghambat efektivitas program. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan komunikasi, verifikasi data yang lebih akurat, dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk memastikan keberhasilan PKH dalam memberdayakan masyarakat miskin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, A., Afdhal, A., & Mustanir, A. (2023). *Pemberdayaan masyarakat*. GET Press Indonesia. <https://publish.getpress.co.id/pemberdayaan-masyarakat-2/>
- Alhada, M., Habib, F., Kunci, K., Masyarakat, P., Kreatif, E., Bumdesa, & Pemberdayaan, E. (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 106–134. <https://www.neliti.com/publications/349377>
- Amri, K., & Setiawan, B. (2020). Targeting effectiveness of a conditional cash transfer program in Indonesia: A case study of Program Keluarga Harapan (PKH). *Journal of Social Intervention: Theory and Practice*, 29(1), 79–95.
- Ayu, K., Sutomo, & Azhari, K. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(1), 1–16. <https://jek.jurnal.unej.ac.id/index.php/JEK/article/view/13083>
- Chasanah, U., Novitasari, T., & Wahyuni, K. E. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Gayungan Surabaya pada era adaptasi kebiasaan

baru. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(5), 6.  
<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jap/article/download/17554/10743>

Endah, K. (2020). Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143.  
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3319>

Firmansyah, D., & Nugroho, F. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan di Kota Tangerang Selatan. *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 20(2), 178–196.  
<https://jurnal.poltekkesos.ac.id/index.php/peksos/article/download/459/339/1043>

Henry, D., Ackerman, M., Sancelme, E., Finon, A., Esteve, E., Nwabudike, L. C., ... & Rello, J. (2020). Urticular eruption in COVID-19 infection. *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*, 34(8), e709–e709.  
<https://doi.org/10.1111/jdv.16472>

Hossain, F., & Ali, S. M. (2018). Community empowerment: A conceptual review. *Developing Country Studies*, 8(1), 42–49. <https://www.iiste.org/Journals/index.php/DCS>

Iswardhana, M. R., & Attamimi, A. M. S. (2023). Efektivitas penerapan kebijakan otonomi daerah dalam penurunan tingkat kemiskinan di Bandung Barat tahun 2019. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 6(2), 108–126.  
<https://core.ac.uk/download/pdf/588290224.pdf>

Jati, R. K., & Susilawati, E. (2019). Challenges in the implementation of social assistance programs in Indonesia: A systematic review. *Public Policy and Administration Research*, 9(7), 1–8.

Maulana, A., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 220–229. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.142>

Moleong, L. J. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Rake Sarasir.  
<https://doi.org/10.31237/osf.io/jhxuw>

Narayan, D. (2017). *Empowerment and poverty reduction: A sourcebook (revisited)*. The World Bank.

Putri, N. A., & Purnaweni, H. (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 510–522.  
<https://eprints.ipdn.ac.id/7152/>

Wulandari, S., Dasopang, A. P., Rawani, G. A., Hasfizetty, I., Sofian, M. Y., Dwijaya, R., & Rachmalija, S. (2022). Kebijakan anti kemiskinan program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3209–3218. <https://media.neliti.com/media/publications/470049-none-2624f286.pdf>